

Apa Kata Mereka....

Kita atau bangsa Indonesia mempunyai banyak generasi yang mampu berprestasi tinggi. Setiap tahun, puluhan, bahkan ratusan, pelajar dan pendidik Indonesia selalu menjadi pemenang dalam lomba-lomba pendidikan dan teknologi tingkat dunia. Para pelajar Indonesia selalu berkemampuan menunjukkan kreativitas yang mampu membuat decak kagum para dewan juri dunia. Para guru pun angkat bicara melalui karya nyata. Berpuluh guru Indonesia juga selalu memberikan prestasi ke tingkat dunia. Apakah prestasi itu merupakan gambaran bahwa dunia pendidikan kita sudah maju?

Jawaban atas pertanyaan itu ada dua: ya dan tidak. Jawaban benar diberikan karena prestasi itu dibuktikan melalui medali sebuah kompetisi. Seperti telah kita ketahui bahwa kompetisi itu hanya diikuti oleh pelajar yang terbatas jumlahnya. Para pelajar itu rerata berasal dari sekolah atau kampus dengan fasilitas yang mencukupi, maka saya menilai bahwa mereka wajar jika mampu meraih prestasi tinggi. Fasilitas tersedia dan itu teramat mendukungnya. Menurut saya, prestasi itu kurang membanggakan.

Bagi saya, pendidikan Indonesia akan maju jika semua warga negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan secara merata. Keadilan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memenuhinya. Pendidikan adalah kebutuhan primer agar dapat

mengubah pola hidup yang lebih beradab dan cerdas. Namun, apa lacur? Semua itu masih sebatas mimpi.

Republika (26 Juli 2011) menyampaikan berita yang cukup membuat miris dan mengelas dada. Diperkirakan 4,7 juta siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang tergolong miskin terancam putus sekolah atau *droup out* (DO). Alasan ekonomilah yang menyulitkan sebagian anak-anak Indonesia untuk meneruskan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Mahalnya biaya pendidikan menjadi alasan utama ketidakberdayaan orang tua dari keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sungguh berita itu teramat ironis dengan gegap gempita serta sorak sorai para pemimpin negeri yang menyatakan bahwa pendidikan kita maju. Maju apanya?

Penggelontoran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) justru sering menjadi *bancakan* para pimpinan institusi. Pungutan di sana sini seakan sudah menjadi tradisi dan tak mungkin dihilangkan, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gerah dan akan melakukan evaluasi ke lapangan guna memantau sekolah-sekolah nakal. Kemdiknas pun angkat bicara. Sekolah nakal akan diberi sanksi. Namun, apakah kebijakan itu akan membuat kapok para pimpinan institusi pendidikan? Saya berpendapat: tidak!

Menurut saya, dunia pendidikan Indonesia memerlukan figur atau pemimpin yang kapabel, kredibel, dan visioner. Pemimpin dunia pendidikan harus menjadi contoh bagi bawahan karena sungguh air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jika pemimpin sudah memberikan contoh yang baik, dengan sendirinya bawahan itu akan meneladaninya. Dan itu pun berlaku sebaliknya. Jika pemimpin itu berperilaku korup, jangan heran jika para guru pun berlaku sama: sama-sama korupsi.

Pemimpin dunia pendidikan pun harus mempunyai kredibilitas yang baik. Ia mesti dapat dipercaya karena kualitas dan prestasinya. Santer terdengar bahwa pemimpin dunia pendidikan

merupakan kepanjangan tangan penguasa setempat sehingga ia tidak mungkin dapat bekerja secara professional sehubungan dengan kedekatannya dengan tangan-tangan politikus. Jika dunia pendidikan sudah dikotori tangan-tangan politikus dan penguasa, lalu apa yang akan diharapkan?

Dan pemimpin dunia pendidikan itu harus berwawasan nasional. Jiwa nasionalismenya mesti setinggi langit. Papua itu masih termasuk wilayah Indonesia. Sabang itu masih tercakup dan menjadi kedaulatan wilayah sah Republik Indonesia. Pulau terpencil dan daerah perbatasan itu masih terakukan sebagai bagian wilayah NKRI. Lalu mengapa visi para pemimpin dunia pendidikan dibatasi pada pendidikan perkotaan atau balas budi. Rerata dunia pendidikan maju karena masih mempunyai kedekatan dengan penguasa yang menjadi punggawa di pemerintah pusat. Jika daerah terpencil itu tidak mempunyai akses ke penguasa, jangan harap dunia pendidikan di sana akan berubah. *Bagi saya, lebih baik miskin tetapi cerdas daripada kaya tetapi menipu!* **[Johan Wahyudi. Pengamat dunia pendidikan dan penulis buku]**

“

Anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN bukan merupakan anggaran yang sedikit, jauh lebih tinggi dari anggaran-anggaran lainnya seperti halnya anggaran untuk kesehatan. Tingginya anggaran pendidikan tidak berarti menjamin kualitas pendidikan akan meningkat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, dibutuhkan dukungan sumber daya manusia (SDM) yang memadai, salah satunya adalah faktor profesionalisme tenaga pendidik (guru).

Pendidikan yang ada saat ini sangatlah mengkhawatirkan. Realita yang ada hari ini di dunia pendidikan lebih mengorien-